



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 472 /KPTS/M/2016**

TENTANG

**PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI
PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membentuk Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020 untuk merekomendasikan asosiasi yang memenuhi persyaratan dan perguruan tinggi/pakar dan pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Pengarah, Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur, dan Sekretariat pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 04/BA/PKU/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020.

- KESATU : Menetapkan Asosiasi Perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020 di 34 Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Menetapkan Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020 di 34 Provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menetapkan Pakar/Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria dan terpilih untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020 di 34 Provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Periode 2016-2020 di 34 Provinsi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Memerintahkan seluruh Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi untuk melakukan Rapat Perdana Kelompok Unsur dalam rangka mengajukan wakil-wakil Kelompok Unsur yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi Periode 2016-2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Ketua Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Perguruan Tinggi dan Pakar yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
3. Kementerian yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Juni 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : KPTS/M/2016

TANGGAL :

TENTANG

PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI
PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA
PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK
UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

DAFTAR ASOSIASI PERUSAHAAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
1.	Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKA (Asosiasi Kontraktor Aceh); 2. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 3. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 4. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 5. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 6. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 7. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 8. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 9. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 10. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 11. GAPKAINDO (Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia); 12. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 13. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
2.	Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKBARINDO (Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia); 2. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 3. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 4. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia); 5. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 6. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 7. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 8. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 9. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 10. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 11. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 12. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 13. GAPKAINDO (Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		14. HIPSINDO (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia); 15. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 16. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
3.	Sumatera Barat	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 3. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 4. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 5. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 6. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 7. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
4.	Riau	1. AKBARINDO (Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia); 2. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 3. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 4. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 5. AKSINDO (Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia); 6. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 7. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 8. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 9. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 10. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 11. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 12. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 13. GARANSI (Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia); 14. HIPSINDO (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia); 15. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 16. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
5.	Jambi	1. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 4. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 5. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 6. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 7. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 8. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
6.	Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 3. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 4. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 5. AKSI (Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia); 6. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 7. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 8. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 9. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 10. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 11. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 12. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 13. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
7.	Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 2. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).
8.	Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 2. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 3. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 4. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 5. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 6. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 7. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 8. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 9. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 10. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
9.	DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 3. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia); 4. AKLINDO (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia); 5. AKMELINDO (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Elektrikal Indonesia); 6. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 7. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 8. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		9. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 10. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 11. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 12. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 13. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 14. HJKI (Himpunan Jasa Konstruksi Indonesia); 15. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 16. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
10.	Jawa Barat	1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 3. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia); 4. AKLINDO (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia); 5. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 6. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 7. AKSINDO (Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia); 8. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 9. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 10. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 11. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 12. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 13. GABPEKSI (Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia); 14. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 15. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 16. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 17. GAPENSINAS (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional); 18. GAPKAINDO (Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia); 19. GARANSI (Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia); 20. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 21. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
11.	Jawa Tengah	1. AKBARINDO (Asosiasi Kontraktor Bangunan Konstruksi Indonesia); 2. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia); 3. AKSI (Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia); 4. APAKSINDO (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia); 5. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 6. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 7. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 8. GABPEKSI (Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia); 9. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		<p>10. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>11. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>12. GAPKAINDO (Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia);</p> <p>13. HIPSINDO (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia);</p> <p>14. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan</p> <p>15. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).</p>
12.	DI Yogyakarta	<p>1. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia);</p> <p>2. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>3. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>4. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan</p> <p>5. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).</p>
13.	Jawa Timur	<p>1. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia);</p> <p>2. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional);</p> <p>3. ASKOPINDO (Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia);</p> <p>4. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia);</p> <p>5. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional);</p> <p>6. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional);</p> <p>7. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia);</p> <p>8. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>9. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>10. HIPSINDO (Himpunan Perusahaan Konstruksi Indonesia);</p> <p>11. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan</p> <p>12. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).</p>
14.	Kalimantan Barat	<p>1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi);</p> <p>2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia);</p> <p>3. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia);</p> <p>4. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia);</p> <p>5. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia);</p> <p>6. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional);</p> <p>7. ASKOPINDO (Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia);</p> <p>8. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia);</p> <p>9. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional);</p> <p>10. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia);</p> <p>11. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);</p> <p>12. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia);</p>

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		13. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 14. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
15.	Kalimantan Tengah	1. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 2. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 6. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
16.	Kalimantan Selatan	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 3. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 4. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 5. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 6. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 7. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 8. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
17.	Kalimantan Timur	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 3. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 4. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 5. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 6. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 7. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 8. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 9. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 10. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 11. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 12. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 13. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 14. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
18.	Sulawesi Utara	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 3. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 4. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 5. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 6. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		7. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 8. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 9. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 10. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
19.	Sulawesi Tengah	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 3. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 4. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 5. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 6. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 7. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 8. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
20.	Sulawesi Selatan	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 3. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 4. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 5. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 6. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 7. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 8. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 9. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 10. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 11. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 12. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 13. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 14. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
21.	Sulawesi Tenggara	1. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 6. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
22.	Bali	1. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 2. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		Indonesia); 3. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 4. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 5. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
23.	Nusa Tenggara Barat	1. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 6. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
24.	Nusa Tenggara Timur	1. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia); 2. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 3. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 4. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 5. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
25.	Maluku	1. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 2. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 6. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
26.	Papua	1. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 2. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 3. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 4. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).
27.	Maluku Utara	1. ASKOPINDO (Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 4. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 5. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 6. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 7. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
28.	Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 3. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia); 4. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 5. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 6. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 7. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 8. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 9. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 10. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 11. GARANSI (Gabungan Rekanan Konstruksi Indonesia); 12. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 13. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
29.	Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 4. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).
30.	Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); dan 2. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia).
31.	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASKOPINDO (Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia); 2. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia); 3. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia); 4. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 5. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 6. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 7. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).
32.	Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional); 2. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 3. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 4. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 5. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
33.	Sulawesi Barat	1. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi); 2. AKKI (Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia); 3. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia); 4. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia); 5. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional); 6. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional); 7. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 8. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); dan 9. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).
34.	Kalimantan Utara	1. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia); 2. GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia); 3. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan 4. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR : 472/ KPTS/M/2016
 TANGGAL : 30 JUNI 2016
 TENTANG
 PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI
 PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA
 PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
 YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK
 UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

DAFTAR ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
 KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
 TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
1.	Aceh	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 4. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan Terampil Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 6. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 7. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 8. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 9. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 10. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 11. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); 12. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia); dan 13. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli dan Terampil Indonesia).
2.	Sumatera Utara	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 4. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 7. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 8. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 9. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		10. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 11. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 12. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 13. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); dan 14. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
3.	Sumatera Barat	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. APTAKINDO (Asosiasi Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 4. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 7. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 8. ATAKNAS (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Nasional); 9. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 10. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 11. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia).
4.	Riau	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 3. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 4. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 6. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 7. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 8. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 9. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 10. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 11. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); 12. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia); dan 13. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia).
5.	Jambi	1. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 2. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 3. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 4. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 5. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		6. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); dan 7. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
6.	Sumatera Selatan	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. APTAKINDO (Asosiasi Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 4. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 7. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 8. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 9. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 10. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); dan 11. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia).
7.	Bengkulu	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 3. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 4. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia).
8.	Lampung	1. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 2. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 3. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 4. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 5. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
9.	DKI Jakarta	1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. HAEI (Himpunan Ahli Elektro Indonesia); 4. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 5. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 6. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 7. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 8. IAP (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia); 9. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia); 10. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		11. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 12. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 13. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 14. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 15. ATAKSI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia); 16. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 17. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); dan 18. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia).
10.	Jawa Barat	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. HAEI (Himpunan Ahli Elektro Indonesia); 3. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 4. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 5. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 6. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 7. IAP (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia); 8. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 9. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 10. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 11. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 12. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 13. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 14. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
11.	Jawa Tengah	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 3. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 4. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 5. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 6. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia); 7. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 8. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 9. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 10. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 11. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 12. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		13. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
12.	D.I. Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 4. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 5. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 6. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 7. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 8. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 9. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
13.	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia); 3. HAEI (Himpunan Ahli Elektro Indonesia); 4. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 5. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 6. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 7. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 8. IAP (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia); 9. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 10. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 11. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 12. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 13. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 14. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 15. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
14.	Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 3. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 4. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 6. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 7. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 8. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); dan

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		9. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia).
15.	Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 2. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia); 3. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 4. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); dan 7. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
16.	Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. A2K4-I (Asosiasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 4. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 7. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 8. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 9. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
17.	Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 3. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 4. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 5. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 6. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 7. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 8. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); dan 9. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
18.	Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 2. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 3. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 4. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 5. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		6. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 7. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); dan 8. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia).
19.	Sulawesi Tengah	1. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 2. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 3. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 4. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); dan 5. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia).
20.	Sulawesi Selatan	1. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 2. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 3. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 4. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 5. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 6. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 7. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia); 8. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 9. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia); 10. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 11. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 12. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 13. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia).
21.	Sulawesi Tenggara	1. APTAKINDO (Asosiasi Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 2. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 3. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 4. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 6. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 7. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
22.	Bali	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia); 3. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 4. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		6. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 7. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
23.	Nusa Tenggara Barat	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 3. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 4. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 5. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); dan 6. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia).
24.	Nusa Tenggara Timur	1. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 2. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 3. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 4. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 5. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 6. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
25.	Maluku	1. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 2. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 3. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); dan 4. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia).
26.	Papua	1. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 2. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 3. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 4. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 5. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 6. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
27.	Maluku Utara	1. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); dan 2. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia).
28.	Banten	1. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 2. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia); 3. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 4. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi);

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
		5. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 6. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 7. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 8. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 9. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 10. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); dan 11. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia).
29.	Gorontalo	1. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 2. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi); 3. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia); 4. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 5. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 6. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
30.	Bangka Belitung	1. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 2. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 3. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); dan 4. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia).
31.	Kepulauan Riau	1. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia); 2. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia); 3. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia); 4. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 5. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia); 6. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia); 7. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); 8. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia); 9. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia); dan 10. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi).
32.	Papua Barat	1. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia); 2. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia); 3. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia); dan 4. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi).

NO	PROVINSI	NAMA ASOSIASI
1	2	3
33.	Sulawesi Barat	ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia).
34.	Kalimantan Utara	ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia).

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 472 /KPTS/M/2016

TANGGAL : 30 JUNI 2016

TENTANG

PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI
PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA
PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK
UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

DAFTAR PERGURUAN TINGGI/PAKAR YANG MEMENUHI KRITERIA MENJADI
KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

NO	PROVINSI	PERGURUAN TINGGI/PAKAR
1	2	3
1.	Aceh	1. Ir. Tripoli, MT; 2. Ir. Ibnu Abbas Majid, M. Sc; 3. Universitas Muhammadiyah Aceh; 4. Universitas Al Muslim; 5. Politeknik Negeri Lhokseumawe; dan 6. Universitas Syiah Kuala.
2.	Sumatera Utara	1. Ir. Tonggo P. Siahaan; 2. Ir. Ruslan Girsang; 3. Ir. Boaz Hutagalung, M. Sc; 4. Ir. Yusran Syafri, M. Si; 5. Tasimin, MT; 6. Institut Sains dan Teknologi TD Pardede; 7. Institut Teknologi Medan; 8. Politeknik Negeri Medan; 9. Universitas Negeri Medan; dan 10. Universitas Sumatera Utara.
3.	Sumatera Barat	1. Dr. Ir. Wardi, M.Si; 2. Prof DR. Eng, Ir. Zaidir, MS, IPU; 3. DR. H. Sukardi, MT; 4. DR. Ir. Bambang Istijono, ME; 5. Ir. Agus, M.Sc; 6. Institut Teknologi Padang; 7. Politeknik Negeri Padang; 8. Universitas Andalas; 9. Universitas Bung Hatta; dan 10. Universitas Negeri Padang.

4.	Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Zulkifli Saleh; 2. H. Zulyaden, SH; 3. Prof DR. Ir. Sugeng Wiyono, MT, MM; 4. Ir. Hendrik Sitompul; 5. Ir. Enno Yuniarto, MT; 6. Politeknik Negeri Bengkalis; 7. Universitas Islam Riau; 8. Universitas Lancang Kuning; 9. Universitas Riau; dan 10. Universitas Pasir Pengaraian Pekanbaru.
5.	Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Sahut Sihite, MTP; 2. Ir. Eddy Suranto, MT; 3. Ir. Azwarman, MT; 4. Ir. Wirya Murad, MM; dan 5. Suhendra, ST, MT.
6.	Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Muhammad Ali Akbar, MT; 2. Ir. Gusti Effendi; 3. Drs. Jon D. Pelonggarbesi, MM; 4. Ir. H. Darmeisa Anti Ras; 5. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE 6. Ir. H. Fazadi Afdanie, MT 7. Universitas Bina Darma; 8. Universitas Muhammadiyah Palembang; dan 9. Universitas Sriwijaya.
7.	Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. M. Nashsyah, MM, MT; 2. Ir. M. Rochman SH; dan 3. Universitas Bengkulu.
8.	Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ir. Herry Riyanto, MT; 2. Ir. Tjetjeng Sofyan, MM; 3. Dr. Masdar Helmi; 4. Dr. Muh Sarkowi; 5. Ir. Yanuar Ratawinata; dan 6. Universitas Bandar Lampung.
9.	DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Alvinsyah, M.Sc; 2. DR. Ir. Rifwandi Rasyidin, M.Si; 3. DR. Ir. Trihono Kadri, MS; 4. Ir. Rizal Budiawan, MIP; 5. Universitas Indonesia; 6. Universitas Pancasila; dan 7. Universitas Persada Indonesia YAI.

10.	Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Eng Imam Achmad Sadisun, ST; 2. Dr. Ir. Samun Haris, MT; 3. DR. Imam Aschuri, MT; 4. Ir. Sumargo, Msc., Ph.D; 5. Ir. Edi Mulyana, MT; 6. Institut Teknologi Bandung; 7. Institut Teknologi Nasional Bandung; 8. Politeknik Negeri Bandung; 9. Universitas Katolik Parahyangan; 10. Politeknik Negeri Jakarta; dan 11. Universitas Padjadjaran.
11.	Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Suharno, MS; 2. Ir. Danang Atmodjo, MT; 3. Ir. Ririh Sudirahardjo, MT; 4. Soepartono, ST, MM; 5. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL; 6. Politeknik Negeri Semarang; 7. Universitas Diponegoro; 8. Universitas Katolik Soegijapranata; 9. Universitas Negeri Semarang; dan 10. Universitas Sebelas Maret.
12.	DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Wuryaningsih; 2. Ir. Ahmad Syaifudin Mutaqi IAI MT; 3. Universitas Gadjah Mada; 4. Universitas Islam Indonesia; 5. Universitas Janabadra; 6. Universitas Kristen Duta Wacana; dan 7. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
13.	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ir. Endah Angraeni, MMT 2. Ir. Agus Indarto, MT 3. Ir. Farich Amin, MM 4. Ir. Nuraini Maimurti, MM 5. Politeknik Negeri Malang; 6. Universitas Brawijaya; 7. Universitas Negeri Malang; 8. Universitas Muhammadiyah Ponorogo; dan 9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
14.	Kalimantan Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik Negeri Pontianak; dan 2. Universitas Tanjungpura.

15.	Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Tampunah Sinseng; 2. Ir. Ridwan Manurung; 3. Frieda, ST, MT; 4. Sudarto, SE; dan 5. Tatau W. Garib, ST, MT.
16.	Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darmansyah, ST; 2. Muchinsyah, ST; 3. Politeknik Negeri Banjarmasin; dan 4. Universitas Lambung Mangkurat.
17.	Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Haryoto HP; 2. Ir. Yusuf, DEA MT; 3. Ir. Wahyullah Bandung, IAI; 4. Ir. Widodotomo, MT; 5. Politeknik Negeri Balikpapan; 6. Politeknik Negeri Samarinda; 7. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; dan 8. Universitas Mulawarman.
18.	Sulawesi Utara	Universitas Sam Ratulangi.
19.	Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Peter Lee Barnabas, MT; 2. Dr. Wayan Sutapa, M. Sc; 3. Dr. Ir. Taslim Bahar, MT; dan 4. Universitas Tadulako.
20.	Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Atma Jaya Makassar; 2. Universitas Hasanuddin; dan 3. Politeknik Negeri Ujung Pandang.
21.	Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Halu Oleo; dan 2. Universitas Muhammadiyah Kendari.
22.	Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Ir. I. Made Alit Karyawan Salain, DEA; 2. Ir. Denny Alex Mantiri; 3. Ir. Dewa Punia Ada, MT; 4. Ir. Nyoman Sukamara, CES; 5. Ir. Ida Bagus Nyoman Sudewa; 6. Universitas Ngurah Rai; 7. Universitas Pendidikan Nasional; 8. Universitas Warmadewa; 9. Politeknik Negeri Bali; dan 10. Universitas Udayana.

23.	Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Surana, M. Sc; 2. Sugeng Wahono, ST; 3. Siti Nurul Hijah, ST. MT; 4. Universitas Mataram; dan 5. Universitas Muhammadiyah Mataram.
24.	Nusa Tenggara Timur	Universitas Nusa Cendana.
25.	Maluku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Totok Murdiyanto, MT; 2. J. Tuahatu, ST, MT; 3. Ir. Nikolas Retraubun, MT; 4. R. D. J. Pattiasina, ST, MT; 5. Politeknik Negeri Ambon; dan 6. Universitas Pattimura.
26.	Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duha Awaluddin, ST, MT; 2. Apollo Safanpo, ST, MT; 3. Andung Yunianta, ST, MT; dan 4. Universitas Sains dan Teknologi Jayapura.
27.	Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. DR. Chusnullah Pangeran, ST, MT; 2. DR. Abdul Gauss, ST, MT; 3. Chaerul Anwar, ST, MT; 4. Endah Harisun, ST, MT; 5. DR. Abdul Azzis Hakim, SHI, MH; 6. Universitas Khairun; dan 7. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.
28.	Banten	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
29.	Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Abdul Karim Sidiki, SH; 2. Taufiqurrahman, S.Sos, M.Si; dan 3. Universitas Negeri Gorontalo.
30.	Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. H. Slamet Riyadi; 2. Ir. Drs. H. Imran Rozi, M. Eng; 3. Ormuz Firdaus, ST, MT; 4. Ir. Ansori, MT; 5. Ir. Ernawati, MM; dan 6. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
31.	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Supriyanto, MT; 2. Iman Purwoto, ST, MT; 3. Politeknik Negeri Batam; dan 4. Universitas Internasional Batam.
32.	Papua Barat	Universitas Negeri Papua.

33.	Sulawesi Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurmiati, ST, MT; 2. Muhamad Sofyan, ST, MT; 3. Dahlia Patah, ST, M.Eng; dan 4. Adyla Suriadi, ST, MT.
34.	Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tamrin, ST, MT; 2. Dr. Muhammad Djaya Bakri, ST, MT; 3. Fuad Harwadi, ST, MT; 4. Dr. Ir. Abdul Jabarsyah Ibrahim, M. Sc, Ph.D; dan 5. Dr. Ir. H. Hermawan, M.Si.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 472/ KPTS/M/2016

TANGGAL : 30 JUNI 2016

TENTANG

PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI
PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA
PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK
UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMENUHI KRITERIA MENJADI
KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI PERIODE 2016-2020

NO	PROVINSI	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1.	Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Cipta Karya; 2. Dinas Bina Marga; 3. Dinas Pengairan Aceh; 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika; 5. Dinas Pertambangan dan Energi; 6. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk; dan 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
2.	Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Bina Marga; 2. Dinas Pengelolaan SDA; 3. Dinas Penataan Ruang dan Permukiman; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 7. Dinas Perhubungan; dan 8. Dinas Pertambangan dan Energi.
3.	Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Prasarana Jalan dan Pemukiman; 2. Dinas Pengelolaan SDA; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi.
4.	Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perhubungan; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Bangunan; 3. Biro Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah; dan 4. Layanan Pengadaan Sarana Elektronik.
5.	Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 5. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama, Sekretariat Daerah.
6.	Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 3. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya; 5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; dan

NO	PROVINSI	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		6. Dinas Tenaga Kerja.
7.	Bengkulu	1. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum.
8.	Lampung	1. Badan Perencana Pembangunan Daerah; 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi; 3. Dinas Bina Marga; 4. Dinas Perairan dan Permukiman; dan 5. Biro Administasi Pembangunan, Sekretariat Daerah.
9.	DKI Jakarta	1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 3. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.
10.	Jawa Barat	1. Dinas Permukiman dan Perumahan; 2. Dinas Bina Marga; 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi; 5. Biro Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah; 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 8. Dinas Perhubungan; dan 9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.	Jawa Tengah	1. Dinas Bina Marga; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah; 3. Dinas Pengelolaan SDA; dan 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
12.	DI Yogyakarta	1. Dinas PUP & ESDM DIY; 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Badan Perencana Pembangunan Daerah; 6. Biro Hukum Sekretariat Daerah; 7. Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah; dan 8. Biro Administasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
13.	Jawa Timur	1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 2. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dan 3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
14.	Kalimantan Barat	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi; 3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; dan 4. Biro Perekonomian dan Pembangunan.
15.	Kalimantan Tengah	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Perindustrian; 4. Dinas Pertambangan; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. BAPPEDA/LITBANG; dan 7. Biro Ekonomi SETDA.
16.	Kalimantan Selatan	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Pendidikan; 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

NO	PROVINSI	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
		6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan 7. Dinas Pertambangan dan Energi.
17.	Kalimantan Timur	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 4. Badan Penelitian dan Pengembangan.
18.	Sulawesi Utara	1. Sekretariat Daerah; 2. Dinas Pekerjaan Umum; dan 3. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
19.	Sulawesi Tengah	1. Dinas Sumber Daya Air; 2. Dinas Bina Marga; 3. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Tata Ruang; 4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan 5. Sekretariat Daerah.
20.	Sulawesi Selatan	1. Dinas Bina Marga; 2. Dinas Tata Ruang dan Permukiman; 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 5. Biro Bina Pembangunan Sekretariat Daerah.
21.	Sulawesi Tenggara	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan 2. Dinas Pekerjaan Umum.
22.	Bali	1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 4. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan 6. Bappeda Kab Bangli.
23.	Nusa Tenggara Barat	1. Biro Administrasi Pembangunan & LPBJP Sekretariat Daerah; 2. Bidang Sumber Daya Air; dan 3. Balai P2JK Dinas Pekerjaan Umum.
24.	Nusa Tenggara Timur	1. Biro Perekonomian; 2. Biro Administrasi Pembangunan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; dan 4. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.
25.	Maluku	1. Dinas Pekerjaan Umum; dan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
26.	Papua	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 4. Dinas Tenaga Kerja; dan 5. Dinas Sosial.
27.	Maluku Utara	1. Dinas Pekerjaan Umum; dan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
28.	Banten	1. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; 2. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; 3. Dinas Pertambangan dan Energi; dan 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
29.	Gorontalo	1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Biro Pengadaan Setda; 3. UPTD Jasa Konstruksi/Lab Uji Material Dinas Pekerjaan Umum;

NO	PROVINSI	INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
30.	Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 4. Biro Pembangunan, Sekretariat Daerah.
31.	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Dinas Pertambangan dan Energi; dan 4. Dinas Perhubungan.
32.	Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum; dan 2. Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi.
33.	Sulawesi Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Biro Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah.
34.	Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; 3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; dan 7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO